

RINGKASAN

Kampanye dalam Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi, kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menyampaikan visi misi peserta pemilu kepada pemilih salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Kampanye perlu dilakukan upaya penegakan hukum oleh Bawaslu agar tidak terjadi suatu pelanggaran dalam pemilu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah Bawaslu Kabupaten Purworejo, serta untuk menganalisis hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Staf Penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo telah efektif dengan adanya tidak semua perkara diselesaikan sampai pengadilan. Hal ini terbukti dengan strategi penegakan hukum yang digunakan oleh Bawaslu mencerminkan pendekatan upaya penegakan hukum secara pre-emptif melalui pendidikan pemilih dan diseminasi informasi, penegakan hukum secara preventif melalui patroli pengawasan media sosial serta imbauan hukum, dan penegakan hukum secara represif melalui proses klarifikasi, kajian awal, serta penerusan perkara ke Sentra Gakkumdu. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Purworejo telah menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum pemilu yang adaptif terhadap tantangan digital. Hambatan penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui media sosial di wilayah hukum Bawaslu Purworejo pada aspek struktur hukum yaitu penegakan hukum dihadapkan pada ketidakharmonisan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, keterbatasan sarana digital forensik, serta tekanan sosial-politik lokal. Lemahnya kapasitas teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya dalam merespons kejahatan digital, menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan belum siap menghadapi karakteristik pelanggaran pemilu di ranah media sosial. Kedua, substansi hukum terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas digital. Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu belum mengatur secara rinci tentang pertanggungjawaban pidana atas konten digital yang dibuat oleh pihak ketiga atau peserta pemilu itu sendiri. Selain itu, belum adanya standar pembuktian elektronik yang seragam menambah kerentanan sistem pembuktian hukum di era digital. Ketiga, yaitu budaya hukum masyarakat menunjukkan sikap permisif terhadap pelanggaran pemilu, khususnya apabila pelaku merupakan figur politik lokal. Budaya ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum digital di kalangan masyarakat dan aparat, yang menyebabkan hukum tidak dipandang sebagai instrumen pengatur yang kuat, melainkan hanya sebagai simbol formal semata.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pemilu, Kampanye Pemilu, Kampanye Media Sosial, Kabupaten Purworejo

SUMMARY

The campaign in the election is one of the important instruments in democratic life, campaigns can be done in various ways to convey the vision of the mission of the election participants to voters one of them by utilizing social media as a means of campaigning. Campaigns need to be made by Bawaslu law enforcement efforts so that there is no violation in the election. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of law enforcement of election crimes through social media in the jurisdiction of Bawaslu Regency Purworejo, as well as to analyze the barriers to law enforcement of election crimes through social media in the jurisdiction of Purworejo Regency.

This kind of qualitative research with empirical juridical approach. The data on this study is presented in the form of descriptive narrative. Primary data sources are obtained through interviews with Bawaslu Bawaslu Regency Managing Staff Purworejo and Bawaslu Province Bawaslu Violation Handling Staff Central Java Province. Secondary data includes legislation and scientific journals.

Based on the results of the study that the enforcement of the law carried out by Bawaslu Purworejo Regency has been effective with the presence of not all cases resolved until the court. This is evident by the law enforcement strategy used by Bawaslu reflects the approach of pre-emptive law enforcement efforts through voter education and information dissemination, preventive law enforcement through social media surveillance patrols and legal appeals, and repressive law enforcement through clarification, initial studies, and case forwarding to Sentra Gakkumdu. The enforcement of the law shows that Bawaslu Purworejo has performed its functions not only as a supervisor, but also as an integral part of the electoral law enforcement system adaptive to digital challenges. The barriers to law enforcement of elections through social media in the Bawaslu Purworejo jurisdiction in the legal structure, law enforcement is faced with the disharmony of coordination in the Sentra Gakkumdu, the limitations of forensic digital means, as well as local social-political pressures. Weak in technical capacity and professionalism of law enforcement apparatus, especially in response to digital crime, suggests that institutional infrastructure is not yet ready to face the characteristics of election violations in the realm of social media. Second, the legal substance is a gap between existing legal norms and digital reality. The provisions of the Election Act have not yet set out in detail about the criminal liability for digital content created by third parties or election participants themselves. In addition, the absence of uniform electronic proofing standards adds to the vulnerability of legal proofing systems in the digital age. Third, the legal culture of the community shows permissive attitude towards violations of elections, especially if the perpetrator is a local political figure. This culture is compounded by the low literacy of digital law among the public and the apparatus, which causes the law not to be seen as a powerful regulatory instrument, but only as a formal symbol

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Election, Election Campaign, Social Media Campaign, Purworejo County*